

KAUM MAYORITAS ASET PEMBANGUNAN

Oleh : Angelina Sondakh, SE

Anggota DPR-RI Komisi X, Fraksi Partai Demokrat

Perempuan yang jumlahnya lebih besar daripada kaum laki-laki saya sebut sebagai kaum mayoritas di negara ini. Mereka adalah kelompok yang harus mendapat perhatian serius terkait dengan belum terpenuhinya hak-hak politik yang sangat fundamental sehingga sampai detik ini, peran kaum mayoritas sekedar dipakai sebagai legitimasi demokrasi prosedural. Quota politik 30% dalam pemilihan umum tahun 2004 yang masih menafikan perolehan suara perempuan mendapat kursi di parlemen seperti yang di alami oleh Nurul Arifin dan Puput Novel merupakan praktek demokrasi yang masih bersifat patriarkhi. Suara yang dikantongi politisi perempuan diatas gagal melanggeng duduk di Senayan hanya gara-gara 'kalah' nomor urut yang diatur oleh partai, kendati kertas suaranya jauh lebih besar daripada nomor urut diatasnya. Ironi politik itu adalah rangkaian dari liku-liku perjuangan berat yang dihadapi oleh kaum perempuan. Tidak tahu sampai kapan ironi mayoritas ini bisa hilang sebagaimana cita-cita yang di impikan dari model demokrasi yang kita pilih sekarang.

Model demokrasi yang setara, egaliter menuju kemakmuran bersama adalah bangunan politik yang ingin kita tuju, karena itu seyogyanya citra kodrati melahirkan, menyusui dan melayani suami yang di konstruksi pada perempuan tidak terus menerus dijadikan legitimasi pembenaran dalam meminggirkan peran mayoritas dalam ranah demokrasi. Sangat disayangkan bila partai sebagai salah satu instrumen *civil society* yang dipercaya tidak beranjak dari cara berpikir baru dalam memajukan perempuan melalui pembukaan ruang politik yang anti diskriminatif terhadap ras, agama, jenis kelamin dalam memerankan fungsi edukasi dan pemberdayaan dalam masyarakat kita. Karena reformasi yang melahirkan demokrasi tak akan matang bila kekuatan *civil-society* terjebak dalam kepentingan kekuasaan semata. Anjloknya kepercayaan publik pasca pemilu 2004 pada partai seyogyanya menjadi cambuk dalam mematangkan arah, tujuan dan orientasi yang lahir dari rahim reformasi politik yang pro pada pemberdayaan rakyat miskin atau partai *pro-poor*. Namun apa yang dilakukan partai jauh api dari panggangnya, partai hanya peduli tatkala momen yang menguntungkan partai saja, sesudah itu rakyat hanyalah komoditi diskusi di ruang rapat dan demonstrasi saja. Atau fulgarnya meminjam anekdot, habis pemilu dan pilkada rakyat langsung ditendang!

Dalam konteks itu, mereka yang paling di rugikan dan merasakan beratnya beban hidup adalah rakyat. Mereka ini kebanyakan adalah kaum perempuan yang paling rentan tatkala negara diguncang oleh krisis ekonomi, politik, budaya dan krisis lainnya. Seorang ibu misalnya terpaksa bekerja ekstra setelah suaminya di PHK oleh perusahaan tempat kerjanya. Fenomena para ibu yang mengambil peran suami dengan bekerja sebagai penjual tukang bakul jamu, tukang cuci, maupun (maaf) menjual diri dilakukannya demi urusan perut rumah tangga yang tidak bisa ditunda kebutuhannya. Karena masalah perut inilah tak jarang orang berbuat nekat melakukan kekerasan dan eksploitasi secara tidak bermoral pada kaum lemah, seperti *trafficking* yang tinggi pada anak perempuan dibawah umur, penganiayaan yang kerap di derita kaum perempuan berupa pemukulan, pemerkosaan secara fisik yang merusak (maaf) genital serta pemerkosaan secara psikologi berupa rasa malu korban (perempuan) pasca pemerkosaan yang rata-rata pelakunya laki-laki atau suami.

Tidak sampai disitu saja, derita lain dari implikasi krisis ekonomi yaitu penyakit busung lapar dari anak-anak akibat gizi buruk. Memang, gizi buruk tidak otomatis karena kemiskinan, namun minimnya kesadaran masyarakat daerah tentang hidup sehat saat hamil juga sangat mungkin menimbulkan penyakit gizi buruk terhadap bayi pada saat di dalam kandungan, hingga pemeriksaan rutin kesehatan juga memegang peran penting terjadinya penyakit gizi busung lapar itu terjadi. Tapi secara umum busung lapar sangat terkait dengan kemiskinan keluarga, meskipun ada temuan menarik di daerah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTT dan NTB) terlihat ada ibu dengan memakai gelang emas ditangan dan dileher - yang sedang antri meminta pertolongan kesehatan anaknya, yang tengah menggendong anaknya dalam kondisi lunglai lemah karena busung lapar pada saat itu - hal itu membangun kesan bahwa kemiskinan bukan satu-satunya faktor terjadinya gizi buruk anak itu terjadi.

Terlepas dari itu, krisis yang dialami negara apapun bentuknya implikasi empuknya selalu rakyat kecil yang menanggung deritanya. Sudah pasti perempuan, ibu, dan anak-anak kita yang menjadi *sangsak* kesengsaraan tersebut. Mereka sangat lemah dan sangat rentan dalam perilaku bunuh diri, kekerasan rumah tangga, serta perilaku lain. Sebagai contoh krisis budaya dan moral, berupa tergesurnya norma-norma turun-temurun di dalam masyarakat kita. Tercerbutnya budaya santun yang tergantikan dengan hedonisme keterbukaan yang liberal membawa masyarakat kita mulai menganggap berbohong, bermewah-mewah dalam kesengsaraan masyarakat kecil menjadi hal yang lumrah dan biasa sekarang ini. Amati media tayangan pendidik kita, yang kini - sengaja atau tidak -

banyak mengajarkan generasi kita dengan tontonan kemewahan melalui sinetron yang 'miskin' rasa dengan realitas masyarakat kita yang banyak sekali terhimpit kemiskinan. Padahal idealnya akar solidaritas yang dimiliki dalam menangani derita kaum lemah ini bisa segera tumbuh, saat kita butuh penyelesaian untuk mengatasi berbagai dampak negatif krisis yang menerpa bangsa ini. Mengapa kita tak juga bisa keluar dari persoalan, meskipun perdebatan tentang formulasi sudah kita pakai dan kita coba berkali-kali dengan cara pergantian pemimpin di negara ini misalnya, namun hasilnya belum maksimal hingga sekarang ini.

Tak ada jawaban memuaskan, karena ketidaksabaran hampir menjadi obsesi semua elit dalam mencari-cari titik lemah ketimbang, bersabar sekaligus memberi masukan sebagaimana dalam teori gotong-royong yang mendorong keutamaan kerjasama dalam mengkonstruksi perbaikan.

PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA YANG LEMAH

Implikasi krisis (ekonomi, politik, budaya dan lainnya) korbannya adalah kaum lemah (perempuan dan ibu-ibu). Karena itu proyeksi pembangunan dalam memperhatikan kaum lemah (mayoritas perempuan) agar terbebas dari diskriminasi, kekerasan serta eksploitasi harus berjalan secara simultan-terintegrasi bila system ekonomi dan politik yang baik juga menjadi prioritas dalam penyelesaian krisis yang dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, dalam ratifikasi CEDAW (*Convention on Elimination of all forms of Discriminations Against Women*), sebuah organisasi internasional dengan misi menghapus kekerasan, memperjuangkan kesetaraan gender serta mengangkat harkat dan martabat secara sama antara laki-laki dan perempuan di dunia. Karena itu Indonesia sebagai salah satu negara anggota CEDAW perlu pula memproyeksikan perempuan menjadi elemen strategis dalam mendorong pembangunan bisa berjalan secara merata di Indonesia. (*Jurnal Perempuan Indonesia, Vol 2005.*)

Upaya perempuan Indonesia sejak puluhan tahun sejak ikut serta menandatangani gerakan internasional agar kekerasan, diskriminasi, trafficking, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan persoalan kaum perempuan lain tak lagi ada dengan lahirnya organisasi ini. Pasalnya hanya dengan kekuatan dan power organisasi seperti ini, musuh demokrasi berupa kemiskinan, diskriminasi, kekerasan dapat di eliminir secara terencana dan berkesinambungan. Indonesia sebagai negara yang telah bergabung dalam CEDAW

mestinya lebih kencang dalam mendorong perbaikan pada persoalan yang masih meminggirkan peran perempuan di Indonesia.

Karena itu, diskriminasi berupa ketimpangan laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, angka kekerasan yang tinggi yang dialami perempuan, perempuan masih sekedar objek formalitas-prosedural dalam demokrasi harus bisa diatasi kaum perempuan sendiri dimanapun peran perempuan itu berada. Di legislatif (DPR), eksekutif (gubernur, walikota, bupati, camat dll) yudikatif (hakim, jaksa, polisi dll) maupun mereka yang berjuang di organisasi sosial, kiranya mau memikirkan kaum perempuan yang masih lemah tersebut. Perjuangan pada mereka bisa dimulai dari lingkungan kita sekitarnya secara simultan. Di tingkat kebijakan (policy), gerakan itu semakin membumi bila dana pendukung dari pemerintah yang masih sangat terbatas, bisa dimaksimalkan lagi dalam menopang keseriusan negara dalam membantu kaum lemah (perempuan). Maklum dana bagi pemberdayaan perempuan masih memakai formula lembaga PKK, Dharma Wanita, yang sudah tidak cocok lagi dengan konsep pemberdayaan di era demokrasi. Dimana banyak sekali lembaga non formal yang berdiri dan fokus pada perjuangan perempuan yang tertatih-tatih karena tiadanya alokasi dana dari pemerintah dengan memadahi. Namun itu bukan artinya responsi pemerintah terhadap isu kesetaraan, diskriminasi dan kekerasan tidak ada sama sekali. Justru tanda-tanda menguatnya gerakan perempuan ini, diharapkan pembangunan nasional yang terencana dalam membawa kesejahteraan rakyat dapat bersinergi memainkan peran pemberdayaan perempuan pada peningkatan kualitas pembangunan kita nantinya. Karena hanya dengan konsep pembangunan yang saling bersinergi, bangsa yang makmur dan damai dapat kita kelola dan kita wujudkan dengan segera. Semoga!****